

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA
PT. BPR DANAMAS BELU
TAHUN 2024**



PT. BPR Danamas Belu

**PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
DANAMAS BELU
TAHUN 2024**

Jl. Seroja – Atambua, Telp. 0389-22999

Email: bpr_danamasbelu@yahoo.com



GOOD CORPORATE GOVERNANCE PT. BPR DANAMAS BELU

Selaras dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR maka dalam menjalankan kegiatan usahanya perlu diterapkan tata kelola yang baik. Tata kelola BPR merupakan proses atau kebijakan yang mengarahkan dan mengendalikan Bank dalam kegiatan operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip GCG yaitu

1. **Keterbukaan (Transparency)** yaitu keterbukaan dalam menyajikan informasi yang material, relevan dan keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.;
2. **Akuntabilitas (Accountability)** yaitu kejelasan fungsi, dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ dalam Bank sehingga pengelolaan perusahaan berjalan secara efektif.;
3. **Pertanggungjawaban(Responsibility)** yaitu pengelolaan Bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan yang sehat sehingga dapat di pertanggungjawabkan kepada semua pemangku kepentingan;
4. **Independensi (Independency)** yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun; dan
5. **Kewajaran (Fairness)** yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Ditengah situasi ekonomi yang penuh persaingan bisnis dan risiko-risiko yang dihadapi industri perbankan BPR Danamas Belu menyadari perlunya penerapan tata kelola yang baik dan berkesinambungan guna menciptakan struktur perbankan yang kuat dan sehat dalam peningkatan daya saing yang terus bertumbuh serta meningkatkan nilai dan kepercayaan masyarakat serta stakeholder

Dasar Pelaksanaan GCG di BPR Danamas Belu

Pelaksanaan GCG BPR Danamas Belu merujuk pada beberapa peraturan yang menjadi dasar penerapan tata kelola di BPR, diantaranya sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.
4. 4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2022 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/SEOJK.03/2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS Laporan Transparansi Pelaksanaan GCG PT. BPR Danamas Belu Tahun 2024
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dan Transparansi Kondisi Keuangan Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/SEOJK.03/2024 tentang Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dan Transparansi Kondisi Keuangan Bagi Bank Perekonomian Rakyat.

Tujuan Pelaksanaan GCG di BPR Danamas Belu.

BPR Danamas Belu dalam melakukan seluruh aktivitasnya sebagai lembaga keuangan berdasarkan kepercayaan, agar mampu tumbuh secara sehat dan prinsip berkelanjutan yang diperlukan landasan tata kelola yang kuat serta penerapan prinsip-prinsip prudential banking yang konsisten, salah satunya melalui pelaksanaan ketentuan Bank. Pelaksanaan dan penerapan prinsip-prinsip tata kelola menjadi komitmen bersama seluruh pengurus dan pegawai BPR Danamas Belu yang dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan.



A. Ringkasan Hasil Penilaian (Self Assessment) atas Penerapan Tata Kelola PT BPR Danamas Belu

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) di BPR Danamas Belu berdasarkan hasil Self Assessment adalah sebagai berikut :

Alamat	: Jalan Seroja Pasar Lama- Atambua
Nomor Telepon	: (0389)22999
Penjelasan Umum	BPR Danamas Belu didalam menjalankan kegiatan usahanya dan/atau fungsi intermediasinya disatu sisi mempunyai ketergantungan yang sangat tinggi pada tingkat kepercayaan masyarakat dan disisi lain juga menghadapi tantangan kompleksitas kegiatan usaha yang mengakibatkan peningkatan eksposur risiko BPR. Oleh karena Itu dengan menyadari bahwa melalui penerapan Tata Kelola BPR yang tepat dan benar akan menjadikan perusahaan dapat tumbuh berkelanjutan serta berhasil dalam mencapai tujuannya, maka BPR Danamas Belu berkomitmen untuk senantiasa menempatkan Tata Kelola sebagai fondasi utama dalam menjalankan bisnis perusahaan serta untuk mempertahankan eksistensi perusahaan dalam menghadapi tantangan dan persaingan usaha di masa-masa mendatang khususnya di sektor industri perbankan.
Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Tata Kelola	: 1,54
Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Tata Kelola	Dari hasil penilaian sendiri atas Penerapan Tata Kelola BPR Danamas Belu berdasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.03/2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat, dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan Tata Kelola BPR Danamas Belu memperoleh Peringkat "Baik". Adapun dasar pertimbangannya adalah karena Penerapan Prinsip-prinsip Tata Kelola secara umum telah dilaksanakan dengan uraian sebagai berikut: Persyaratan dari Pemegang Saham, Jumlah,Komposisi,Independensi, Integritas serta Reputasi Keuangan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris telah dipenuhi oleh Bank, Direksi dan Dewan Komisaris BPR telah memiliki Tata Tertib Kerja tertulis sebagai pedoman dalam menjalankan Tugas dan Tanggung Jawabnya,Penerapan Kepatuhan dalam Kegiatan Usaha BPR mengalami peningkatan dilihat dari frekuensi temuan Audit Internal yang semakin menurun setiap bulannya dan berperan aktif dari penerapan fungsi Audit Internal telah berjalan lebih baik dari tahun sebelumnya meskipun belum maksimal dan menyeluruh terhadap keberlangsungan kegiatan usaha BPR. tidak terdapat pengaduan konsumen terkait kegiatan usaha BPR. Peningkatan tersebut diatas terdapat pula kelemahan dan kekurangan yang menjadi perhatian BPR kedepannya yakni Realisasi Rencana Bisnis yang tidak tercapai yaitu dari sisi Perolehan Laba, ROA, BOPO dan NPL Tahun 2024



B. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi telah lengkap sesuai ketentuan, dimana Dewan Komisaris berjumlah 2 (dua) dan Dewan Direksi berjumlah 2 (dua) dan setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper tes)

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1.	NIK*)	:*)
	Nama	: SIPRIANUS BINTURA
	Jabatan	: DIREKTUR UTAMA
	Tugas dan Tanggung Jawab**)	: Menjalankan Fungsi Bisnis BPR
2.	NIK*)	:*)
	Nama	: MARIA ADELINA FATIMA MALI
	Jabatan	: DIREKTUR YANG MENJALANKAN FUNGSI KEPATUHAN
	Tugas dan Tanggung Jawab**)	: Menjalankan Fungsi Kepatuhan BPR

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris***):
 Komposisi Direksi telah memenuhi syarat dan ketentuan terkait jumlah komposisi Direksi sesuai dengan ketentuan POJK Tata Kelola BPR. Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya Direksi telah memastikan seluruh kegiatan operasional BPR telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris	
1.	NIK*)	:*)
	Nama	: JOHANES FOUK SERANG
	Jabatan	: KOMISARIS UTAMA
	Tugas dan Tanggung Jawab**)	:Melakukan fungsi pengawasan seluruh kegiatan operasional bank oleh Direksi
2.	NIK*)	:*)
	Nama	: NOVEMBRANUS RATU RIHI
	Jabatan	: KOMISARIS
	Tugas dan Tanggung Jawab**)	: Melakukan fungsi pengawasan seluruh kegiatan operasional bank oleh Direksi

Rekomendasi kepada Direksi:
 Dewan Komisaris telah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya secara obyektif dan bebas dari tekanan dan kepentingan pihak yang tidak sesuai dengan peraturan Perundang-undangan demi kepentingan BPR secara keseluruhan. Antara melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi serta memastikan bahwa Bank telah melaksanakan Tata Kelola dengan baik dan melakukan Pelaporan Pengawasan secara periodik Kepada OJK dan memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan Audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif, Audit Internal, KAP dan OJK.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

a. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite*)	
1.	Komite Audit	
	Tugas dan Tanggung Jawab	:
	Program Kerja	:
	Realisasi	:
	Jumlah Rapat	:
2.	Komite Pemantau Risiko	
	Tugas dan Tanggung Jawab	:
	Program Kerja	:
	Realisasi	:
	Jumlah Rapat	:



3.	Komite Remunerasi dan Nominasi	
	Tugas dan Tanggung Jawab	:
	Program Kerja	:
	Realisasi	:
	Jumlah Rapat	:
4.	Komite Manajemen Risiko	
	Tugas dan Tanggung Jawab	:
	Program Kerja	:
	Realisasi	:
	Jumlah Rapat	:
5.	Komite Lainnya**)	
	Tugas dan Tanggung Jawab	:
	Program Kerja	:
	Realisasi	:
	Jumlah Rapat	:

BPR Danamas Belu saat ini belum memiliki Komite.

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	NIK *)	Nama	Keahlian **)	Komite***)					Pihak Independen (Ya/Tidak)
				Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi dan Nominasi	Manajemen Risiko	Lainnya	
1.									
2.									

BPR Danamas Belu saat ini belum memiliki Komite.

C. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

dalam ribuan rupiah

No.	NIK *)	Nama Anggota Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1.	*)	SIPRIANUS BINTURA	540.000.000	8,44%	540.000,-	10%

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

dalam ribuan rupiah

No.	NIK *)	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1.	*)	JOHANES FOUK SERANG	3.300.000.000	51,56%	2.700.000,-	50%

D. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	NIK*)	Nama Anggota Direksi	Sandi Bank Lain*)/**)	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.					



2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	NIK*)	Nama Anggota Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain*)/**)	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.					

Anggota Direksi maupun Komisaris saat ini tidak memiliki kepemilikan saham pada perusahaan lain

E. Hubungan Keuangan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR
1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	NIK*)	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan**)		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	*)	SIPRIANUS BINTURA	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2.	*)	MARIA ADELINA FATIMA MALI	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Anggota Direksi tidak memiliki keterkaitan keuangan antara sesama Direksi, Dewan Komisaris maupun Pemegang Saham

2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	NIK*)	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan**)		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	*)	JOHANES FOUK SERANG	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2.	*)	NOVEMBRANUS RATU RIHI	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki keterkaitan keuangan antara sesama Direksi , Dewan Komisaris maupun Pemegang Saham

F. Hubungan Keluarga Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR
1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	NIK*)	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga **)		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	*)	SIPRIANUS BINTURA	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2.	*)	MARIA ADELINA FATIMA MALI	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga antara sesama Direksi , Dewan Komisaris maupun Pemegang Saham

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	NIK*)	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga **)		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	*)	JOHANES FOUK SERANG	tidak ada	tidak ada	ada
2.	*)	NOVEMBRANUS RATU RIHI	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Komisaris Utama tidak memiliki hubungan keluarga antara sesama Direksi, Dewan Komisaris namun memiliki hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Bapak Stefanus Jonathan Soejatno (Anak dari Bapak Johannes Fouk Serang). Untuk Komisaris Independen tidak memiliki hubungan keluarga antara sesama Direksi, dewan komisaris maupun pemegang saham.



G. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS
dalam ribuan rupiah

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji*)	2	Rp.240.000,-	2	Rp.108.000,-
2.	Tunjangan	2	Rp.224.496,-	2	Rp.115.008,-
3.	Tantiem				
4.	Kompensasi berbasis saham				
5.	Remunerasi lainnya**)				
Total Remunerasi			Rp.464.496,-		Rp.223.008,-
Jenis Fasilitas Lain					
1.	Perumahan		Tidak ada		Tidak ada
2.	Transportasi		Mabil Dinas		Tidak ada
3.	Asuransi kesehatan		BPJS Kesehatan		BPJS Kesehatan
4.	Fasilitas lainnya***)		Kacamata		Tidak ada
Total Fasilitas Lain					
Total Remunerasi dan Fasilitas Lain					

Fasilitas kepada pengurus diantaranya mobil dinas beserta biaya maintainace dan kacamata untuk Direktur Utama

H. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan.

Keterangan*)	Perbandingan**)
	(a/b)
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2.69
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	2.07
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1.06
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2.73
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	4.11

Rasio gaji tertinggi dan terendah tidak mengalami perubahan signifikan dari tahun sebelumnya.

I. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris dalam 1 (satu) Tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	20240308	4	PERTUMBUHAN KREDIT KANTOR PUSAT DAN KANTOR CABANG
2.	20240507	6	PENURUNAN NPL DAN PENAGIHAN BUNGA KREDIT TERTUNGGAK SERTA PERKEMBANGAN KINERJA BPR TW II
3.	20240807	4	PERTUMBUHAN BPR DANAMAS BELU DAN MANAJEMEN RISIKO DALAM BEKERJA
4.	20241001	4	RENCANA TEKNIS MENJALAKAN PEKERJAAN DAN SISTEM KERJA YANG BERORIENTASI PADA PENINGKATAN KINERJA BPR



J. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	NIK*)	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran**) (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1.	*)	JOHANES FOUK SERANG	4	0	100%
2.	*)	NOVEMBRANUS RATU RIHI	4	0	100%

K. Jumlah Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*)

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelum-nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum-nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum-nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum-nya	Tahun Laporan
Total <i>Fraud</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan	0	0	0	0	0	0	0	0
Dalam Proses Penyelesaian*)	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaian-nya***)	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum	0	0	0	0	0	0	0	0

Tidak ditemukan penyimpangan Fraud (Internal Bank) sepanjang tahun 2024.

L. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	1	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	1	0

Sepanjang tahun 2024 BPR memiliki 1 permasalahan hukum perdata dan telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)

M. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Penerima Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan**)
	NIK*)	Nama	Jabatan	NIK*)	Nama	Jabatan			
1.									
2.									
dst.									

Tidak terdapat transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan



Atambua, 22 Januari 2025
PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
DANAMAS BELU



SIPRIANUS BINTURA
Direktur Utama



JOHANES FOUK SERANG
Komisaris Utama



KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA BPR

Nama BPR : PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT DANAMAS BELU

Posisi : 31 Desember 2024

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Nilai Komposit
Nilai Faktor	1	1	2	-	1	2	2	1	3	1	1	2	1,54
Predikat Komposit	Manajemen BPR telah melakukan penerapan tata kelola secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip tata kelola , secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat segera di selesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BPR												

Kesimpulan Akhir

BPR mampu menjalankan tata kelola dengan baik bagi dari segi pemenuhan struktur, proses maupun hasilnya walaupun masih terdapat beberapa kekurangan minor yang perlu dievaluasi dan diperbaiki

Faktor Positif
a. Struktur

Semua aspek tata kelola dari segi Pemegang Saham, pelaksanaan tugas, tanggungjawab dan wewenang Direksi, pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris, penanganan benturan kepentingan, penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, audit eksern, manajemen risiko dan sistem pengendalian intern, batas maksimum pemberian kredit BPR, integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi dan rencana bisnis BPR telah memiliki pedoman, kebijakan dan prosedur sesuai ketentuan OJK atau Otoritas lainnya yang berlaku.

KAP dan Akuntan Publik yang digunakan memiliki kompetensi yang memadai dan terdaftar pada OJK Penugasan Akuntan Publik dan KAP telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar akuntan publik dan waktu penyelesaian audit.

RBB dan RAKB disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris

Dalam RBB telah di gambarkan strategi jangka panjang, rencana penguatan modal, serta rencana penanganan permasalahan sesuai ketentuan yang berlaku

Rencana bisnis BPR telah didukung oleh pemegang saham

b. Proses

➤ Dari aspek Pemegang Saham

Pemegang saham dapat cepat memberikan informasi dan saran yang berguna bagi pengembangan BPR. Pengarahan dilakukan melalui RUPS serta Pemegang saham tidak pernah melakukan intervensi terhadap kegiatan operasional BPR.

➤ Dari aspek Pelaksanaan Tugas, Tanggungjawab dan Wewenang Direksi

Direksi telah menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja. Direksi tidak memberikan kuasa umum (pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas) dan Direksi telah membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kualiaty SDM berupa inhouse traning maupun sosialisasi melalui Virtual Meeting. Dalam menjalankan tugas Direktur Utama menangani fungsi bisnis sedangkan Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan menangani Kepatuhan BPR.

➤ Dari aspek Pelaksanaan Tugas, Tanggungjawab dan Wewenang Dewan Komisaris

Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawab dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan itikad baik dan prinsip kehati-hatian dan tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris.

➤ Penanganan Benturan Kepentingan

Tidak di temukan transaksi yang mengadung benturan kepentingan

- **Penerapan Fungsi Kepatuhan**
Bagian Kepatuhan telah merumuskan strategi dan mengkaji pedoman, kebijakan dan prosedur yang berorientasi pada visi, misi dan nilai BPR serta mensosialisasi ketentuan terkini kepada seluruh unit kerja.
Anggota Direksi yang membawakan fungsi Kepatuhan telah memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat BPR kepada OJK.
- **Penerapan Fungsi Audit Internal**
PE Audit Internal tidak terlibat dalam kegiatan operasional BPR. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Audit Internal dilakukan secara independen dan memadai.
- **Penerapan Fungsi Audit Eksternal**
Penunjukan KAP dan Akuntan Publik dilakukan sesuai rekomendasi Dewan Komisaris dan dituangkan dalam Risalah RUPS.
KAP dan AP yang ditunjuk terdaftar pada OJK dan memiliki ijin Audit.
BPR melaporkan Hasil Audit dan Management Letter tepat waktu ke OJK.
- **Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud, termasuk Sistem Pengendalian Intern**
BPR telah memiliki pedoman dan prosedur internal terkait manajemen risiko.
Setiap transaksi BPR melalui evaluasi dan persetujuan Direksi.
BPR telah memiliki pedoman internal terkait APU PPT dan PPSPM.
BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku.
Belum pernah terjadi fraud.
- **Batas Maksimum Pemberian Kredit BPR**
Tidak terdapat pelanggaran / pelampauan BMPK terkait pemberian kredit BPR kepada pihak terkait maupun kredit dengan plafon besar.
Proses pemberian kredit telah memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BPR melakukan pemantauan terhadap seluruh proses pemberian kredit secara berkala.
- **Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi**
BPR Telah memiliki sistem pelaporan keuangan yang didukung oleh sistem informasi yang memadai.
BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait Teknologi Informasi dan memiliki SDM yang mampu menjalankan dan mengelola sistem.
- **Rencana Bisnis BPR**
Melakukan penilaian yang saksama terhadap calon debitur, Mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, Mematuhi asas-asas perkreditan yang sehat serta prinsip kehati-hatian, Mematuhi pedoman kebijakan dan prosedur tertulis, Tidak membuat perikatan yang mewajibkan bank untuk menyediakan dana yang mengakibatkan terjadinya pelampauan BMPK
Penerapan manajemen risiko dapat dilakukan dengan Pengawasan aktif dari Dewan komisaris dan Direksi, serta mitigasi risiko diseluruh kegiatan usaha BPR dengan Mengidentifikasi risiko, Menilai risiko Mengatasi risiko, Memantau dan melaporkan risiko, serta melakukan komunikasi dan konsultasi untuk mencari solusi penyelesain.

Dewan Komisaris BPR melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR

c. Hasil

- **Dari aspek Pemegang Saham**
Struktur Pemegang Saham telah memenuhi seluruh ketentuan dan tidak terdapat benturan kepentingan, intervensi dan pengambilan keuntungan pribadi. Seluruh pengambilan kebijakan dilakukan melalui RUPS dan sejalan dengan anggaran dasar BPR dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta rencana strategis Bank. Hasil Putusan ditetapkan dan dituangkan dalam RUPS. Hal ini tercermin dari pemenuhan ketentuan permodalan BPR.

- Dari aspek Pelaksanaan Tugas, Tanggungjawab dan Wewenang Direksi
Direksi memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab dilakukan dengan itikad baik, penuh tanggungjawab, kehati-hatian dan independen serta hasil kerja Direksi dapat di pertanggungjawabkan sepenuhnya kepada Pemegang Saham melalui RUPS dan di tuangkan dalam Risalah Rapat.
Direksi telah melakukan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi termasuk mengangkat Pejabat Eksekutif sesuai dengan ketentuan dan kompleksitas kegiatan usaha
Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja.
Direksi memiliki kemampuan dan kemauan serta upaya membudayakan pembelajaran secara berkala dan berkelanjutan sehingga terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian dan kemampuan
Direksi juga melakukan tindak lanjut seluruh temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari PE Audit Internal, Akuntan Publik, hasil pengawasan Dewan Komisaris dan OJK.
- Dari aspek Pelaksanaan Tugas, Tanggungjawab dan Wewenang Dewan Komisaris
Dewan Komisaris memenuhi seluruh persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil kinerja komisaris di pertanggungjawabkan dalam RUPS. Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja
- Penanganan Benturan Kepentingan
Belum pernah ditemukan benturan kepentingan yang mengurangi keuntungan BPR.
- Penerapan Fungsi Kepatuhan
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan dapat menjalankan tugas dengan baik dan hasil kinerja di pertanggungjawabkan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam RUPS.
BPR telah memiliki Pedoman, Kebijakan dan Prosedur secara keseluruhan dan bagian Kepatuhan telah mengkinikan seluruh kebijakan dan prosedur telah sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan
Laporan Pokok-Pokok Anggota Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan disampaikan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu kepada OJK
Hingga saat ini belum pernah ada laporan khusus Kepatuhan.
- Penerapan Fungsi Audit Internal
Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pejabat Eksekutif Audit Internal berjalan dengan sangat baik serta hasil kinerja dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya kepada Direktur Utama.
Penyampaian laporan dilakukan secara lengkap, akurat, kini, utuh dan tepat waktu.
Laporan Pokok-Pokok hasil Audit Internal telah disampaikan kepada OJK secara tepat waktu dan untuk saat ini belum terdapat laporan khusus
- Penerapan Fungsi Audit Eksternal
Hasil Audit KAP dan Akuntan Publik serta management letter telah menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas,
Hasil Audit dan management letter disampaikan secara lengkap, akurat, kini, utuh dan tepat waktu
- Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud, termasuk Sistem Pengendalian Intern
BPR telah memiliki pedoman kebijakan dan prosedur manajemen risiko.
Penerapan fungsi manajemen risiko dilakukan dengan baik walaupun masih perlu perbaikan.
Peringkat risiko BPR cukup memadai dan tidak terdapat fraud.
- Batas Maksimum Pemberian Kredit BPR
Laporan pemberian kredit kepada pihak terkait telah dilaporkan secara berkala setiap bulan dengan lengkap, akurat, kini, utuh, benar dan tepat waktu melalui laporan Bulanan Apolo
Penyaluran Kredit BPR tidak melanggar atau melampaui ketentuan terkait BMPK.
- Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi
BPR memiliki sistem pelaporan keuangan yang didukung oleh Sistem Informasi Manajemen yang memadai sehingga laporan dapat disampaikan secara lengkap, akurat, kini, utuh dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
SDM kompeten dalam penyusunan laporan keuangan.

Laporan keuangan yang disajikan dapat membantu Direksi dalam pengambilan keputusan yang tepat serta membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan.
 Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan serta rekayasa keuangan dan rekayasa hukum dalam penggunaan Sistem Teknologi Informasi.
 Hingga saat ini belum pernah ada pengaduan yang disampaikan oleh nasabah/debitur terkait produk dan layanan BPR.

- Rencana Bisnis BPR
 Rencana bisnis dan perubahan rencana bisnis telah disampaikan kepada OJK sesuai limit waktu dan tidak terjadi keterlambatan pelaporan

Faktor Negatif

a. Struktur

Dari aspek Kepatuhan masih terdapat kelemahan dan kekurangan dari sisi evaluasi ketentuan.

b. Proses

- Dari aspek Pemegang Saham
 Sejauh ini belum ditemukan kelemahan.
- Dari aspek Pelaksanaan Tugas, Tanggungjawab dan Wewenang Direksi
 Masih terdapat temuan OJK yang bersifat minor dan tidak berdampak pada kondisi dan kelangsungan usaha BPR namun tetap perlu menjadi perhatian BPR.
- Dari aspek Pelaksanaan Tugas, Tanggungjawab dan Wewenang Dewan Komisaris
 Kurang tersedianya waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab secara optimal.
- Penanganan Benturan Kepentingan
 Sejauh ini belum ditemukan kelemahan.
- Penerapan Fungsi Kepatuhan
 Masih terdapat kendala pada kurangnya tingkat awarness SDM terhadap peraturan yang berlaku dan untuk itu masih perlu peningkatan Sosialisasi terhadap seluruh unit kerja.
- Penerapan Fungsi Audit Internal
 Ruang lingkup audit internal masih kurang pada laporan keuangan yang disampaikan ke OJK, Unit Kepatuhan, MR, APU PPT
- Penerapan Fungsi Audit Eksternal
 Sejauh ini belum ditemukan kelemahan.
- Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud, termasuk Sistem Pengendalian Intern
 Masih terdapat kendala dalam pengendalian risiko kredit BPR. Dapat dilihat dengan meningkatnya kredit kualitas buruk sepanjang tahun 2024. Hal ini dipengaruhi oleh faktor situasi dan kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih dari covid-19, melemahnya daya beli masyarakat pada umumnya dan konflik situasi politik timur tengah yang belum mereda yang berdampak pada penyaluran kredit BPR.
- Batas Maksimum Pemberian Kredit BPR
 Sejauh ini belum ditemukan kelemahan.
- Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi
 Sejauh ini belum ditemukan kelemahan.
- Rencana Bisnis BPR
 Faktor eksternal yang menjadi pertimbangan adalah kondisi ekonomi yang tidak stabil dan cenderung stagnan, persaingan yang tinggi dengan PJK lain dan koperasi-koperasi yang tersebar di wilayah setempat, serta temuan riwayat calon debitur yang kebanyakan kolektibilitas macet sehingga di tolak.

c. Hasil

- Dari aspek Pemegang Saham
Untuk tahun 2024 tidak terdapat pembagian dividen dikarenakan laba masih minus sehingga RUPS memutuskan untuk tidak melakukan pembagian Dividen
- Dari aspek Pelaksanaan Tugas, Tanggungjawab dan Wewenang Direksi
Sejauh ini belum ditemukan kelemahan.
- Dari aspek Pelaksanaan Tugas, Tanggungjawab dan Wewenang Dewan Komisaris
Sejauh ini belum ditemukan kelemahan.
- Penanganan Benturan Kepentingan
Sejauh ini belum ditemukan kelemahan.
- Penerapan Fungsi Kepatuhan
Masih perlu dilakukan sosialisasi untuk menumbuhkan budaya terhadap Kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- Penerapan Fungsi Audit Internal
Laporan Audit Internal belum menyeluruh.
- Penerapan Fungsi Audit Eksternal
Sejauh ini belum ditemukan kelemahan.
- Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud, termasuk Sistem Pengendalian Intern
Walaupun manajemen risiko telah berjalan dengan cukup baik namun masih perlu dilakukan peningkatan kompetensi SDM dan pengembangan budaya manajemen risiko kepada seluruh jenjang organisasi.
- Batas Maksimum Pemberian Kredit BPR
Sejauh ini belum ditemukan kelemahan.
- Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi
Sejauh ini belum ditemukan kelemahan.
- Rencana Bisnis BPR
Pencapaian realisasi kinerja keuangan dan non keuangan BPR belum sepenuhnya sesuai dengan target RBB

Atambua, 22 Januari 2025

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
DANAMAS BELU**SIPRIANUS BINTURA**
Direktur Utama**JOHANES FOUK SERANG**
Komisaris Utama